



Disinformasi Digital dalam Perspektif Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Ayat-Ayat *Tabayyun* di Era Algoritma

Qonita Fathin Suhaila*

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia, 20371

Email: qonita0403231044@uinsu.ac.id

Nazwa Nadia

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia, 20371

Email: nazwa0403232155@uinsu.ac.id

Farid Adnir

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia, 20371

Email: faridadnir@uinsu.ac.id

Histori	Diserahkan	Direvisi	Diterima	Tersedia Online
Naskah	15 April 2026	22 Mei 2026	18 Juni 2026	29 Juni 2026

Abstract

The rise of digital disinformation in algorithm-based communication ecosystems has changed the mechanisms of information production, distribution, and consumption, thereby increasing the opportunity for the spread of misleading information through the logic of virality, content personalization, and the reinforcement of cognitive biases. This condition places the concept of *tabayyun* in the Qur'an as a relevant epistemological framework for examining the contemporary information crisis. This study aims to analyze the concept of *tabayyun* in the Qur'an, trace the genealogy of misleading information from a Qur'anic perspective, identify the Qur'anic epistemological critique of the logic of algorithms and the culture of virality in the Qur'an, and explain the relevance of the verses of *tabayyun* in understanding the dynamics of digital disinformation. This research is a qualitative, literature-based study with a thematic interpretation (*mawḍū'ī*) approach to verses on *tabayyun*, information, lies, prejudice, and news dissemination. The results of the study indicate that the Qur'an establishes an information verification system that places source checking, fact validation, evaluation of informant credibility, and control of prejudice as prerequisites for the formation of valid knowledge. The Quran also identifies factors contributing to the emergence of misleading information, such as haste in accepting news, the dominance of prejudice, information manipulation, and the reproduction of news without adequate verification. The Quran's critique of accepting information without evidence closely aligns with the algorithmic problem of amplifying content without regard for its validity. Thus, *tabayyun* is a fundamental epistemological principle that remains relevant as an analytical tool for addressing the information crisis and disinformation in the algorithmic era.

Keywords: *Tabayyun*; Digital Disinformation; Thematic Interpretation; Epistemology of the Qur'an; Information Algorithm

Abstrak

Meningkatnya disinformasi digital dalam ekosistem komunikasi berbasis algoritma telah mengubah mekanisme produksi, distribusi, dan konsumsi informasi sehingga memperbesar peluang penyebaran informasi menyesatkan melalui logika viralitas, personalisasi konten, dan penguatan bias kognitif. Kondisi tersebut menempatkan konsep *tabayyun* dalam Al-Qur'an sebagai kerangka epistemologis yang relevan untuk menelaah krisis informasi kontemporer. Kajian ini bertujuan menganalisis konsep *tabayyun* dalam Al-Qur'an, menelusuri genealogi informasi menyesatkan dalam perspektif Al-Qur'an, mengidentifikasi kritik epistemologis Al-Qur'an terhadap logika algoritma dan budaya viralitas, serta menjelaskan relevansi ayat-ayat *tabayyun* dalam membaca dinamika disinformasi digital. Penelitian ini merupakan studi kualitatif berbasis kepustakaan dengan pendekatan tafsir tematik (*mawḍū'i*) terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan *tabayyun*, informasi, kebohongan, prasangka, dan penyebaran berita. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur'an membangun sistem verifikasi informasi yang menempatkan pemeriksaan sumber, validasi fakta, evaluasi kredibilitas informan, dan pengendalian prasangka sebagai prasyarat pembentukan pengetahuan yang sah. Al-Qur'an juga mengidentifikasi faktor-faktor penyebab lahirnya informasi menyesatkan, seperti ketergesa-gesaan dalam menerima berita, dominasi prasangka, manipulasi informasi, dan reproduksi kabar tanpa verifikasi memadai. Kritik Al-Qur'an terhadap penerimaan informasi yang tidak berbasis bukti memiliki korespondensi kuat dengan problem algoritmik yang mendorong amplifikasi konten tanpa mempertimbangkan validitasnya. Dengan demikian, *tabayyun* merupakan prinsip epistemologis fundamental yang tetap relevan sebagai instrumen analisis terhadap krisis informasi dan disinformasi pada era algoritma.

Kata Kunci: *Tabayyun*; Disinformasi Digital; Tafsir Tematik; Epistemologi Al-Qur'an; Algoritma Informasi

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola produksi, distribusi, dan konsumsi informasi secara fundamental. Arus informasi bergerak melintasi batas geografis dengan kecepatan tinggi melalui media sosial, mesin pencari, dan berbagai platform komunikasi digital (Lu, Schaefer, Park, Joo, & Pan, 2024). Perubahan tersebut menghasilkan kemudahan akses pengetahuan sekaligus memunculkan persoalan serius terkait kualitas informasi yang beredar. Disinformasi menjadi salah satu tantangan utama masyarakat kontemporer karena informasi yang tidak akurat dapat membentuk persepsi publik, memengaruhi pengambilan keputusan, serta memicu konflik sosial dan politik (Freelon & Wells, 2020). Karakter komunikasi digital yang mengutamakan kecepatan penyebaran sering kali menempatkan verifikasi informasi sebagai aspek sekunder. Situasi tersebut menciptakan ruang yang memungkinkan informasi palsu, manipulatif, atau menyesatkan beredar secara luas sebelum proses klarifikasi dilakukan. Persoalan ini menyentuh dimensi epistemologis mengenai cara manusia memperoleh, memeriksa, dan menerima kebenaran.

Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam memberikan perhatian serius terhadap persoalan informasi melalui konsep *tabayyun* yang menekankan verifikasi, ketelitian, dan kehati-hatian sebelum menerima ataupun menyebarkan suatu berita

(Masri & Warsodirejo, 2023). Konsep tersebut memiliki relevansi penting untuk dikaji kembali karena menawarkan perspektif normatif sekaligus epistemologis terhadap problem disinformasi yang berkembang seiring transformasi sistem komunikasi digital.

Fenomena disinformasi digital menunjukkan intensitas yang semakin tinggi sejalan dengan berkembangnya teknologi algoritma. World Economic Forum (2024) menempatkan penyebaran informasi palsu sebagai salah satu ancaman utama terhadap stabilitas sosial dan kualitas demokrasi global. Algoritma platform digital dirancang untuk meningkatkan keterlibatan pengguna melalui mekanisme personalisasi konten. Sistem tersebut cenderung memprioritaskan informasi yang mampu menarik perhatian dan memicu interaksi, bukan informasi yang telah melalui proses verifikasi memadai. Akibatnya, konten sensasional lebih mudah memperoleh visibilitas tinggi dibandingkan informasi yang faktual dan berimbang (Piduru, 2022). Fenomena *echo chamber* dan *filter bubble* memperkuat kecenderungan pengguna untuk menerima informasi yang sesuai dengan preferensi serta keyakinan yang telah dimiliki sebelumnya (Rhodes, 2022). Kondisi tersebut menyebabkan proses pembentukan opini publik semakin rentan terhadap manipulasi informasi. Realitas ini menunjukkan bahwa problem disinformasi dapat dipahami sebagai krisis epistemologis yang berkaitan dengan standar kebenaran dan mekanisme validasi informasi.

Kajian mengenai *tabayyun* dan disinformasi telah memperoleh perhatian cukup luas dalam penelitian akademik. Firmansyah et al. (2025) menunjukkan bahwa konsep *tabayyun* merupakan prinsip etika komunikasi Islam yang menekankan verifikasi informasi sebelum penyebaran berita dilakukan. Kajian tersebut berfokus pada dimensi normatif perilaku individu dalam berkomunikasi. Savhira, Alaika, dan Firdaus (2020) menjelaskan relevansi Surah al-Hujurat ayat 6 terhadap fenomena hoaks media sosial serta menegaskan pentingnya sikap kritis pengguna media digital. Fokus utama penelitian tersebut terletak pada penguatan literasi informasi berbasis nilai keagamaan. Murtiningsih dan Adeoye (2025) mengkaji hubungan antara penyebaran hoaks dan moralitas komunikasi Islam. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penyebaran informasi palsu bertentangan dengan prinsip kejujuran dan tanggung jawab sosial. Aulia, Al Ayubi, dan Rosyadi (2025) menganalisis konsep *tabayyun* melalui pendekatan tafsir tematik serta menghasilkan pemetaan ayat-ayat yang berkaitan dengan verifikasi berita. Kajian tersebut lebih menekankan aspek konseptual *tabayyun* tanpa menghubungkannya dengan struktur teknologi digital kontemporer.

Guess et al. (2023) membahas pengaruh algoritma media sosial terhadap pembentukan opini publik dan polarisasi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem algoritmik memiliki peran signifikan dalam menentukan distribusi serta visibilitas informasi. Meskipun demikian, penelitian tersebut tidak mengaitkan temuan teknologi komunikasi dengan perspektif Al-Qur'an maupun tradisi tafsir.

Telaah terhadap penelitian terdahulu memperlihatkan adanya kecenderungan pemisahan antara kajian tafsir Al-Qur'an dan kajian algoritma digital. Sebagian penelitian membahas *tabayyun* sebagai etika komunikasi. Sebagian lain membahas disinformasi sebagai persoalan teknologi informasi. Belum banyak penelitian yang menempatkan ayat-ayat *tabayyun* sebagai kerangka analisis epistemologis untuk membaca mekanisme produksi, distribusi, dan reproduksi disinformasi yang bekerja melalui logika algoritma digital. Kekosongan tersebut menunjukkan adanya ruang akademik yang masih terbuka. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghadirkan pembacaan tafsir tematik terhadap ayat-ayat *tabayyun* sebagai instrumen analisis kritis untuk memahami fenomena disinformasi digital yang dibentuk oleh sistem algoritmik. Penelitian ini tidak membatasi *tabayyun* sebagai ajaran moral individual, melainkan menempatkannya sebagai paradigma epistemologis yang dapat digunakan untuk mengkaji struktur pengetahuan dan mekanisme sirkulasi informasi kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana konstruksi konseptual *tabayyun* berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan verifikasi informasi; bagaimana Al-Qur'an menjelaskan sumber serta mekanisme munculnya informasi yang menyesatkan; bagaimana prinsip epistemologis *tabayyun* dapat digunakan untuk mengkritisi logika algoritma yang mengatur distribusi informasi digital; bagaimana relevansi ayat-ayat *tabayyun* dalam membaca dinamika disinformasi era algoritma. Penelitian ini bertujuan menjelaskan struktur konseptual *tabayyun* secara komprehensif melalui pendekatan tafsir tematik, mengidentifikasi mekanisme distorsi informasi yang digambarkan Al-Qur'an, menganalisis hubungan antara prinsip verifikasi dan sistem algoritmik, serta mengungkap relevansi ayat-ayat *tabayyun* terhadap problem disinformasi kontemporer. Argumen dasar penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa disinformasi digital merupakan persoalan epistemologis yang memerlukan kerangka analisis lebih mendalam dibanding pendekatan etika komunikasi semata. Ayat-ayat *tabayyun* mengandung prinsip verifikasi, validasi sumber, kritik terhadap prasangka, serta kehati-hatian dalam penerimaan informasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan problem sirkulasi informasi era digital. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan studi tafsir tematik kontemporer yang responsif terhadap transformasi teknologi komunikasi.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan metode tafsir tematik (*mawḍūʿī*) yang dipadukan dengan analisis epistemologi digital untuk mengkaji relevansi ayat-ayat *tabayyun* dalam konteks disinformasi di era algoritma. Sumber data primer terdiri atas ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *tabayyun*, *taṣabbut*, *khavar*, *ifk*, *kazib*, *ẓann*, dan konsep lain yang berhubungan dengan validitas informasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari kitab tafsir klasik dan kontemporer, literatur tafsir tematik, kajian disinformasi

digital, teori algoritma, serta penelitian mutakhir mengenai ekosistem media digital. Pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi dan inventarisasi ayat-ayat yang memiliki keterkaitan tematik dengan informasi dan verifikasi, penelusuran penafsiran para mufasir terhadap ayat-ayat tersebut, pemetaan konsep-konsep kunci yang membentuk kerangka epistemologi informasi Al-Qur'an, serta penghimpunan literatur yang menjelaskan karakter disinformasi dan mekanisme algoritma digital. Analisis data dilakukan melalui kategorisasi tema, analisis semantik terhadap istilah-istilah kunci, pembacaan intertekstual antarayat untuk menemukan pola konseptual yang utuh, kemudian dilanjutkan dengan analisis kontekstual-dialogis yang mempertemukan struktur epistemologi Qur'ani dengan mekanisme produksi, distribusi, dan legitimasi informasi dalam lingkungan algoritmik sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai posisi *tabayyun* sebagai prinsip verifikasi informasi dalam ruang digital kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

***Tabayyun* dalam Al-Qur'an sebagai Mekanisme Verifikasi Informasi**

Struktur konseptual *tabayyun* dalam Al-Qur'an berakar pada prinsip epistemologis yang menempatkan verifikasi sebagai prasyarat pembentukan pengetahuan yang sah. Landasan utama konsep ini termuat dalam Surah al-Hujurat ayat 6 memerintahkan orang beriman untuk melakukan *tabayyun* ketika menerima suatu berita (*naba'*) agar tidak menjatuhkan keputusan berdasarkan ketidaktahuan yang berujung pada penyesalan. Ayat tersebut membangun kerangka epistemik yang menghubungkan proses penerimaan informasi, pemeriksaan validitas, dan pembentukan pengetahuan. Struktur ayat menunjukkan hubungan kausal antara informasi yang belum terverifikasi dan potensi lahirnya kesalahan penilaian. Posisi *tabayyun* muncul sebagai mekanisme yang memutus rantai kesalahan tersebut melalui proses klarifikasi dan pengujian. Perspektif tafsir tematik memperlihatkan bahwa konsep ini menjadi bagian dari sistem pengetahuan Al-Qur'an yang menuntut kesesuaian antara informasi, bukti, dan kesimpulan (Purnama, 2021). Pengetahuan dibangun melalui prosedur kognitif yang memungkinkan seseorang memperoleh pemahaman yang memiliki dasar argumentatif dan evidensial.

Analisis semantik terhadap istilah *tabayyun* memperlihatkan kedalaman makna yang melampaui pengertian klarifikasi sederhana. Kata *tabayyun* berasal dari akar kata ت-ب-ي-ن yang mengandung makna keterpisahan, kejelasan, keterbukaan, serta kemampuan membedakan sesuatu secara tepat (Ibn Faris, 1979). Bentuk verba *tabayyana* menunjukkan proses aktif untuk memperoleh kejelasan terhadap objek yang sebelumnya belum terang. Aktivitas tersebut mengandaikan keterlibatan intelektual subjek dalam menguji informasi sebelum menerimanya sebagai pengetahuan. Variasi *qirā'ah* yang menggunakan istilah *taṣabbut* memperkaya dimensi makna ayat. *Taṣabbut* berasal dari akar kata ت-ب-ث yang menunjukkan makna keteguhan, kepastian, dan kestabilan (Al-Fayrūzābādī,

2005). Jika *tabayyun* menekankan aspek penyingkapan kejelasan, *tasabbut* menekankan pencapaian kepastian melalui pemeriksaan yang cermat. Hubungan kedua istilah tersebut membentuk dua tahap epistemologis yang saling melengkapi, yaitu proses memperoleh kejelasan dan proses memastikan validitas. Integrasi makna keduanya menunjukkan bahwa verifikasi informasi menurut Al-Qur'an mengarah pada pencapaian keyakinan yang memiliki landasan rasional dan evidensial.

Makna *khabar* dan *naba'* turut memberikan kontribusi penting bagi konstruksi epistemologi informasi Al-Qur'an. Ibn Manẓūr (1999) membedakan *khabar* sebagai informasi atau pemberitaan secara umum, sedangkan *naba'* merujuk pada berita yang memiliki signifikansi tinggi dan konsekuensi yang luas. Penggunaan istilah *naba'* dalam Surah al-Hujurāt ayat 6 mengandung implikasi epistemologis yang penting karena objek verifikasi bukan sekadar informasi biasa, melainkan berita yang berpotensi memengaruhi penilaian dan tindakan manusia. Al-Qur'an menggunakan istilah *naba'* dalam berbagai konteks yang berkaitan dengan informasi penting, seperti Surah al-Naba' ayat 2 dan Surah Ṣād ayat 67, yang menunjukkan hubungan erat antara *naba'* dan pengetahuan bernilai tinggi (Shihab, 1996). Signifikansi istilah tersebut menunjukkan bahwa semakin besar konsekuensi suatu informasi, semakin tinggi tuntutan verifikasinya. Perspektif ini mengindikasikan adanya prinsip proporsionalitas epistemologis dalam Al-Qur'an. Tingkat kehati-hatian tidak ditentukan oleh jumlah informasi yang diterima, melainkan oleh bobot kebenaran dan dampak yang melekat pada informasi tersebut. Konstruksi ini menempatkan verifikasi sebagai instrumen untuk menjaga integritas hubungan antara informasi dan pengetahuan sehingga keputusan yang lahir memiliki dasar yang dapat diuji secara rasional.

Penafsiran para mufasir klasik menunjukkan perhatian yang kuat terhadap aspek epistemologis ayat *tabayyun*. Al-Ṭabarī (2001) menafsirkan ayat tersebut sebagai perintah untuk memeriksa kebenaran berita sebelum mengambil tindakan berdasarkan informasi yang diterima. Fokus penafsirannya terletak pada kebutuhan memperoleh pengetahuan yang akurat sebelum pembentukan keputusan. Ibn Kaṣīr (2004) mengembangkan gagasan serupa dengan menekankan pentingnya penyelidikan terhadap validitas berita agar seseorang tidak terjerumus dalam kesalahan penilaian. Sementara itu, al-Qurṭubī (1964) melihat ayat ini sebagai dasar normatif bagi kewajiban pemeriksaan informasi yang belum jelas status kebenarannya. Meskipun para mufasir klasik banyak membahas konteks turunnya ayat yang berkaitan dengan laporan tertentu, substansi tafsir mereka menunjukkan keberadaan prinsip umum mengenai prosedur pembentukan pengetahuan. Nilai utama ayat terletak pada kaidah epistemologis yang bersifat universal. Informasi belum dapat diterima sebagai dasar pengetahuan sebelum melalui proses pengujian yang memadai. Kesamaan pandangan para mufasir klasik menunjukkan bahwa

tabayyun dipahami sebagai mekanisme perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan epistemik akibat penerimaan informasi secara prematur.

Mufasir kontemporer memperluas cakupan konseptual *tabayyun* dengan menempatkannya sebagai prinsip epistemologi Qur'ani yang berkaitan dengan metode pencarian kebenaran. Ibn 'Āsyūr (1985) memandang *tabayyun* sebagai prosedur rasional yang menjaga objektivitas penilaian manusia terhadap informasi yang diterimanya. Penekanannya tidak terbatas pada aspek moral, melainkan mencakup dimensi metodologis pengetahuan. Al-Zuhaylī (2009) mengaitkan ayat tersebut dengan keharusan memperoleh dasar informasi yang kuat sebelum melahirkan keyakinan atau keputusan. Perspektif yang lebih luas dikembangkan oleh Muḥammad al-Ghazālī (1994) yang menempatkan verifikasi sebagai karakter dasar cara berpikir Islam yang menolak penerimaan informasi tanpa pemeriksaan kritis. Pembacaan kontemporer ini menunjukkan pergeseran fokus dari konteks historis menuju struktur pengetahuan yang dibangun ayat. *Tabayyun* tidak hanya dipahami sebagai kewajiban etis, melainkan sebagai perangkat metodologis yang mengatur hubungan antara data, bukti, penalaran, dan kesimpulan. Perkembangan interpretasi tersebut memperlihatkan kemampuan konsep *tabayyun* untuk berfungsi sebagai fondasi teoritis dalam pembentukan epistemologi informasi yang berorientasi pada validitas dan akurasi.

Jaringan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pengetahuan semakin menegaskan posisi *tabayyun* sebagai instrumen epistemologis. Surah al-Isrā' ayat 36 melarang mengikuti sesuatu tanpa ilmu dan menegaskan tanggung jawab intelektual manusia terhadap sumber pengetahuannya. Surah Yūnus ayat 36 mengkritik dominasi dugaan (*ẓann*) dalam pembentukan keyakinan karena dugaan tidak dapat menggantikan kebenaran. Surah al-Zumar ayat 18 memuji orang yang mendengarkan berbagai informasi lalu mengikuti yang paling baik setelah melakukan penilaian kritis. Keseluruhan ayat tersebut membentuk kerangka epistemologi Qur'ani yang menempatkan verifikasi, evaluasi rasional, dan pengujian bukti sebagai unsur fundamental pencarian kebenaran. *Tabayyun* berfungsi sebagai mekanisme operasional yang menjembatani prinsip-prinsip tersebut. Struktur konseptualnya menunjukkan bahwa pengetahuan yang sah lahir melalui proses pemeriksaan, bukan sekadar penerimaan. Epistemologi Al-Qur'an tidak memberi ruang bagi klaim kebenaran yang berdiri tanpa dasar informasi yang jelas dan dapat diuji. Posisi *tabayyun* akhirnya dapat dipahami sebagai instrumen epistemologis yang memastikan kesesuaian antara realitas, informasi, dan pengetahuan, sehingga proses pencarian kebenaran berlangsung melalui prosedur yang sistematis, rasional, dan bertanggung jawab.

Genealogi Informasi Menyesatkan dalam Al-Qur'an: Analisis terhadap Produksi dan Distorsi Kebenaran

Pendekatan tafsir tematik terhadap ayat-ayat yang memuat istilah *ifk*, *kazib*, *buhtān*, *qawl al-Zūr*, *fitnah*, *khars*, *rajm bi al-Ghayb*, serta berbagai bentuk

penyimpangan informasi menunjukkan pola konseptual yang konsisten mengenai asal-usul lahirnya kebohongan publik. Al-Qur'an menggambarkan informasi menyesatkan sebagai konstruksi naratif yang diproduksi secara sadar untuk menggeser persepsi masyarakat terhadap realitas (Murtiningsih & Adeoye, 2025). Istilah *ifk* secara etimologis mengandung makna pembalikan fakta, yaitu proses mengubah kebenaran menjadi kebatilan dan kebatilan menjadi sesuatu yang tampak benar (Al-Nawawī, 1976). Makna tersebut menegaskan bahwa disinformasi menurut Al-Qur'an bukan sekadar kekeliruan penyampaian informasi, melainkan rekayasa epistemik yang mengubah struktur pemahaman kolektif melalui manipulasi makna. Karakter semacam ini tampak pada penggunaan istilah *ifk* untuk menggambarkan tuduhan terhadap Nabi Muhammad, tuduhan terhadap Aisyah, serta berbagai bentuk penyimpangan keyakinan yang dibangun melalui narasi palsu (Is, Harahap, & Eddien Sharief, 2025). Fokus utama Al-Qur'an tertuju pada proses produksi pengetahuan yang sengaja dirancang untuk menutupi kebenaran dan menciptakan realitas alternatif yang menguntungkan pihak tertentu.

Kasus *al-Ifk* sebagaimana terekam dalam Surah al-Nur ayat 11-20 memperlihatkan mekanisme produksi informasi menyesatkan yang sangat kompleks. Narasi tersebut berawal dari spekulasi yang dikembangkan menjadi opini sosial melalui reproduksi informasi secara berantai. Al-Qur'an menggambarkan para pelaku sebagai kelompok yang secara aktif membangun tuduhan, mengedarkan narasi, dan memanfaatkan ruang sosial agar informasi tersebut memperoleh legitimasi publik (Is et al., 2025). Frasa *talaqqawnahu bi alsinatikum* menunjukkan proses penerimaan dan transmisi informasi tanpa landasan pengetahuan yang memadai. Frasa *taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi 'ilm* mengungkap praktik reproduksi informasi yang tidak memiliki dasar evidensial (Shihab, 2010). Struktur ayat tersebut memperlihatkan kebohongan publik lahir melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari konstruksi isu, penyebaran narasi, pengulangan informasi, pembentukan persepsi kolektif, hingga normalisasi tuduhan sebagai kebenaran sosial. Pola tersebut menunjukkan bahwa kekuatan sebuah kebohongan terletak pada kemampuan jaringan sosial untuk mengulang dan mendistribusikan narasi secara terus-menerus. Al-Qur'an memandang proses tersebut sebagai ancaman serius terhadap integritas moral masyarakat karena kebohongan memperoleh kekuatan melalui sirkulasi sosial, bukan melalui bukti.

Genealogi informasi menyesatkan juga berkaitan erat dengan motif ideologis. Al-Qur'an berulang kali mengaitkan praktik kebohongan dengan upaya mempertahankan sistem keyakinan, otoritas simbolik, atau kepentingan kelompok tertentu. Tuduhan kaum musyrik terhadap Al-Qur'an sebagai *ifk muftara* dan tuduhan terhadap para Nabi sebagai penyihir, pendusta, atau orang gila menunjukkan penggunaan disinformasi sebagai instrumen delegitimasi ideologis (Ridha & Abduh, 2008). Tujuannya bukan membuktikan kesalahan lawan secara rasional, melainkan membangun persepsi negatif agar pesan kebenaran kehilangan

kredibilitas sebelum diterima masyarakat. Strategi tersebut menunjukkan relasi erat antara produksi informasi dan perebutan otoritas makna. Narasi palsu berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan hegemoni kelompok dominan ketika argumentasi substantif tidak lagi mampu mempertahankan posisi kekuasaan (Mahasneh, 2023). Perspektif ini memperlihatkan bahwa Al-Qur'an memahami informasi sebagai arena kontestasi ideologis tempat berbagai aktor berusaha mengendalikan definisi kebenaran yang berlaku secara sosial.

Motif politik memperoleh perhatian signifikan melalui berbagai kisah mengenai kaum munafik. Karakteristik utama kaum munafik bukan sekadar ketidaksesuaian antara ucapan dan keyakinan, melainkan kemampuan memanfaatkan informasi sebagai instrumen destabilisasi sosial (Is et al., 2025). Surah al-Aḥzāb, al-Tawbah, dan al-Munāfiqūn menggambarkan bagaimana kelompok tersebut menyebarkan rumor, menciptakan keraguan, memperbesar ketakutan, serta membangun persepsi negatif terhadap kepemimpinan Nabi. Praktik tersebut menunjukkan penggunaan informasi sebagai teknologi kekuasaan. Kebohongan diproduksi untuk mengarahkan perilaku publik sesuai kepentingan politik pelaku. Menurut Mernissi (1993), narasi yang disebarkan bertujuan melemahkan solidaritas sosial, mengurangi legitimasi otoritas, serta menciptakan fragmentasi komunitas. Fenomena tersebut mengungkap bahwa produksi disinformasi dalam perspektif Al-Qur'an sering kali terkait dengan konflik kepentingan yang melibatkan perebutan pengaruh sosial dan politik. Informasi berubah menjadi instrumen strategis yang dapat digunakan untuk membentuk persepsi massa tanpa memerlukan penggunaan kekuatan fisik secara langsung.

Dimensi ekonomi turut menjadi faktor penting dalam pembentukan informasi menyesatkan. Al-Qur'an mengaitkan kebohongan dengan praktik eksploitasi, manipulasi transaksi, serta perlindungan terhadap keuntungan material (Shihab, 2010). Kisah para penentang dakwah para Nabi menunjukkan kecenderungan kelompok elit menggunakan narasi tertentu untuk mempertahankan kepentingan ekonomi yang terancam oleh perubahan sosial. Penolakan terhadap kebenaran sering kali disertai produksi informasi yang mendistorsi realitas guna menjaga stabilitas posisi ekonomi kelompok dominan (Rifqa, Shidqon, & Tumewu, 2023). Praktik tersebut menunjukkan bahwa kebohongan dapat berfungsi sebagai mekanisme perlindungan kepentingan material. Relasi antara ekonomi dan disinformasi terlihat ketika informasi digunakan untuk memengaruhi persepsi masyarakat mengenai legitimasi suatu sistem sosial, sehingga struktur distribusi keuntungan tetap terpelihara. Al-Qur'an memandang tindakan tersebut sebagai bentuk penyimpangan moral karena informasi diperlakukan sebagai komoditas kekuasaan yang dapat direkayasa sesuai kebutuhan pelaku.

Aspek psikologis menempati posisi sentral dalam genealogi informasi menyesatkan menurut Al-Qur'an. Banyak ayat menghubungkan kebohongan dengan sifat hasad, kesombongan, kebencian, fanatisme kelompok, ketakutan kehilangan

status, serta kecenderungan mengikuti prasangka. Surah al-Ḥujurāt, Yūnus, al-Najm, dan al-An'ām menggambarkan bagaimana prasangka (*ẓann*) dapat berkembang menjadi sumber pengetahuan semu yang kemudian menghasilkan kesimpulan keliru mengenai realitas. Kondisi psikologis tersebut menciptakan lingkungan kognitif yang kondusif bagi lahirnya informasi palsu. Al-Qur'an menunjukkan bahwa penyimpangan informasi berakar pada interaksi antara faktor internal pelaku dan struktur sosial yang mendukung reproduksi kebohongan. Produksi informasi menyesatkan akhirnya menjadi hasil pertemuan antara kepentingan subjektif, dorongan emosional, dan strategi sosial yang dirancang untuk memengaruhi persepsi publik. Keseluruhan gambaran tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an memahami disinformasi sebagai fenomena struktural yang melibatkan aktor, motif, jaringan sosial, dan relasi kekuasaan.

Kritik Epistemologis Al-Qur'an terhadap Logika Algoritma dan Budaya Viralitas

Karakter utama ekosistem informasi digital kontemporer terletak pada dominasi algoritma sebagai mekanisme seleksi, pemeringkatan, dan distribusi informasi. Algoritma berfungsi sebagai struktur epistemik yang menentukan informasi mana yang memperoleh visibilitas tinggi, informasi mana yang tersingkir, serta narasi mana yang membentuk kesadaran kolektif. Logika operasionalnya bertumpu pada pengukuran interaksi pengguna melalui klik, komentar, tayangan, durasi keterlibatan, dan berbagai indikator engagement lainnya (Maalsen, 2023). Akibatnya, nilai suatu informasi sering kali ditentukan oleh performa sirkulasinya, bukan oleh kualitas verifikasi atau ketepatan faktualnya. Budaya viralitas lahir melalui mekanisme tersebut dengan mengubah perhatian publik menjadi komoditas utama. Informasi yang memicu emosi, kontroversi, kemarahan, atau sensasi memperoleh peluang lebih besar untuk disebarluaskan secara masif dibanding informasi yang menuntut refleksi kritis dan verifikasi rasional (Tellis et al., 2019). Situasi ini menghasilkan pergeseran mendasar pada cara masyarakat memahami kebenaran. Kebenaran tidak lagi dipersepsikan berdasarkan korespondensi antara informasi dan realitas, melainkan berdasarkan intensitas kemunculan suatu narasi pada ruang digital. Semakin sering suatu informasi muncul, semakin besar peluangnya diterima sebagai fakta sosial, meskipun landasan evidensialnya lemah.

Perspektif epistemologi Al-Qur'an menghadirkan kritik mendasar terhadap pola tersebut melalui penolakannya terhadap *ẓann* sebagai dasar pengetahuan. Surah al-Ḥujurāt ayat 6 menempatkan prasangka, dugaan, dan asumsi yang tidak didukung bukti sebagai bentuk pengetahuan yang cacat secara epistemologis. Kritik ini tidak terbatas pada aspek moral, melainkan menyentuh fondasi pembentukan kebenaran. Al-Qur'an membedakan secara tegas antara ilmu yang berakar pada bukti dan pengetahuan semu yang dibangun melalui persepsi, spekulasi, atau reproduksi opini. Logika algoritma justru cenderung memperkuat bentuk-bentuk

pengetahuan yang memperoleh respons emosional tinggi tanpa mempersyaratkan validitas epistemik. Viralitas sering bekerja melalui penyederhanaan realitas kompleks menjadi narasi singkat yang mudah dibagikan dan mudah dipercaya. Informasi yang beredar luas akhirnya memperoleh status kebenaran sosial melalui efek repetisi (Mäkelä et al., 2021). Fenomena tersebut bertentangan dengan orientasi epistemologis Al-Qur'an yang menempatkan pembuktian, penalaran kritis, dan pengujian informasi sebagai syarat legitimasi pengetahuan. Kritik Al-Qur'an terhadap *ẓann* menunjukkan penolakan terhadap setiap sistem yang memungkinkan dugaan memperoleh kedudukan setara dengan fakta.

Aspek lain yang memperoleh sorotan kritis ialah kecenderungan algoritma menciptakan *filter bubble* dan *echo chamber*. Kedua fenomena tersebut muncul ketika sistem digital secara berkelanjutan menyajikan informasi yang selaras dengan preferensi, keyakinan, dan perilaku pengguna sebelumnya (Talamanca & Arfini, 2022). Lingkungan informasi menjadi semakin homogen karena paparan terhadap perspektif alternatif terus berkurang. Pengguna akhirnya hidup dalam ruang epistemik tertutup yang memperkuat keyakinan yang telah dimiliki sebelumnya. Konsekuensi utamanya bukan hanya polarisasi sosial, melainkan penyempitan horizon pengetahuan. Al-Qur'an secara konsisten mengkritik sikap mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu dan tanpa proses penalaran yang memadai. Kritik terhadap *taqlīd*, penerimaan informasi secara pasif, serta ketundukan terhadap kebiasaan kolektif menunjukkan pentingnya keterbukaan intelektual dalam proses pencarian kebenaran (Suswita, 2025). *Echo chamber* bekerja melalui logika yang berlawanan karena ia mengurangi kemungkinan koreksi epistemik dan memperkuat ilusi kepastian. Informasi yang terus berulang dalam komunitas homogen sering dipersepsikan sebagai kebenaran objektif meskipun hanya mencerminkan konsensus kelompok tertentu (Ranalli & Malcom, 2025). Struktur semacam ini menghasilkan kondisi ketika individu kehilangan akses terhadap keragaman perspektif yang diperlukan untuk melakukan evaluasi kritis. Epistemologi Al-Qur'an menuntut penggunaan akal, pengamatan, dan refleksi sebagai sarana memperoleh pengetahuan yang sah. *Filter bubble* justru membatasi proses tersebut melalui seleksi informasi yang dikendalikan oleh prediksi algoritmik.

Kritik epistemologis Al-Qur'an juga relevan terhadap fenomena amplifikasi algoritmik yang menjadikan popularitas sebagai indikator utama relevansi informasi. Sistem digital modern dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna sehingga informasi yang memperoleh respons besar akan terus direkomendasikan kepada lebih banyak orang (Ruan, Liu, & Chang, 2025). Mekanisme ini menghasilkan efek bola salju yang memperbesar dominasi narasi tertentu tanpa mempertimbangkan kualitas epistemiknya. Surah al-An'ām ayat 116 mengkritik kecenderungan mengikuti mayoritas ketika mayoritas tersebut tidak berlandaskan pengetahuan dan petunjuk yang benar. Kritik tersebut menunjukkan

bahwa kuantitas dukungan tidak identik dengan validitas kebenaran. Logika algoritma bergerak ke arah yang berlawanan karena legitimasi informasi sering diukur melalui jumlah interaksi, jumlah pengikut, tingkat popularitas, atau intensitas penyebaran. Akibatnya, opini yang paling banyak diperhatikan memperoleh posisi dominan dalam ruang publik, sedangkan informasi yang lebih akurat namun kurang menarik secara emosional cenderung terpinggirkan (Hastuti et al., 2025). Struktur ini menciptakan ilusi epistemik berupa anggapan bahwa sesuatu yang populer pasti benar. Al-Qur'an menawarkan prinsip yang berbeda dengan menempatkan bukti, argumentasi, dan integritas pengetahuan sebagai standar evaluasi.

Pergeseran otoritas pengetahuan merupakan konsekuensi lanjutan dari transformasi struktur informasi tersebut. Era digital memperlihatkan perpindahan pengaruh epistemik dari institusi keilmuan, otoritas intelektual, dan mekanisme verifikasi menuju aktor yang memiliki kapasitas tinggi dalam menarik perhatian publik (Berg et al., 2026). *Influencer*, figur viral, akun anonim, serta produsen konten populer sering memperoleh posisi yang lebih menentukan dibanding sumber pengetahuan yang memiliki kompetensi substantif (Zhang & Gosline, 2023). Otoritas tidak lagi dibentuk terutama oleh kedalaman ilmu, melainkan oleh kemampuan menjangkau audiens dalam skala besar. Situasi ini mengubah konstruksi kebenaran publik menjadi lebih bergantung pada ekonomi perhatian daripada kualitas argumentasi. Perspektif Al-Qur'an menempatkan pengetahuan sebagai hasil hubungan antara bukti, akal, dan tanggung jawab moral. Setiap klaim memerlukan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan otoritas epistemik harus terkait dengan kapasitas memahami realitas secara benar (Safrizal et al., 2026). Ketika algoritma mengutamakan metrik interaksi sebagai penentu distribusi informasi, otoritas pengetahuan mengalami dekontekstualisasi. Individu yang paling terlihat belum tentu menjadi individu yang paling kompeten. Kondisi tersebut membuka ruang luas bagi pembentukan persepsi publik yang terlepas dari standar epistemik yang ketat. Kritik Al-Qur'an terhadap penerimaan informasi tanpa ilmu memperoleh relevansi strategis karena ia menolak pemisahan antara otoritas dan kompetensi pengetahuan.

Konstruksi kebenaran publik yang lahir melalui budaya viralitas pada akhirnya memperlihatkan pertentangan mendasar antara epistemologi Al-Qur'an dan rasionalitas algoritmik. Epistemologi Al-Qur'an berorientasi pada pencarian kebenaran melalui pembuktian, refleksi kritis, penggunaan akal, serta penghindaran prasangka dan spekulasi. Rasionalitas algoritmik berorientasi pada optimalisasi perhatian, peningkatan keterlibatan pengguna, dan perluasan jangkauan informasi. Perbedaan orientasi tersebut menghasilkan dua model epistemik yang berbeda secara fundamental. Model pertama menempatkan validitas sebagai pusat pengetahuan, sedangkan model kedua menempatkan visibilitas sebagai sumber utama legitimasi sosial. Kritik Al-Qur'an tidak diarahkan semata-mata kepada isi

informasi yang salah, melainkan kepada struktur yang memungkinkan kesalahan memperoleh status kebenaran melalui reproduksi massal. Signifikansi kritik ini terletak pada kemampuannya mengungkap dimensi epistemologis yang sering tersembunyi di balik teknologi digital. Algoritma membentuk cara masyarakat memahami realitas, menentukan otoritas, dan mendefinisikan kebenaran. Kerangka epistemologi Al-Qur'an menawarkan landasan kritis untuk menilai struktur tersebut dengan menegaskan supremasi ilmu atas popularitas, bukti atas persepsi, serta verifikasi atas viralitas. Perspektif ini menghadirkan koreksi normatif terhadap kecenderungan era digital yang mengonversi perhatian publik menjadi ukuran kebenaran sosial dan menjadikan sirkulasi informasi lebih berpengaruh daripada validitas pengetahuan itu sendiri.

Relevansi Ayat-Ayat *Tabayyun* dalam Membaca Dinamika Disinformasi Digital Kontemporer

Ayat-ayat *tabayyun* menawarkan perangkat analisis yang menempatkan informasi sebagai objek verifikasi sebelum diterima sebagai dasar penilaian dan tindakan. Perspektif ini menggeser orientasi komunikasi dari kecepatan penyebaran menuju kualitas pembuktian. Signifikansi pendekatan tersebut semakin terlihat ketika arus informasi digital menghadirkan kondisi kelebihan informasi yang membuat individu lebih mudah menerima klaim berdasarkan kedekatan emosional, afiliasi kelompok, atau preferensi ideologis dibandingkan validitas faktualnya (Apuke et al., 2024). Prinsip *tabayyun* menegaskan bahwa penerimaan informasi harus didahului pengujian terhadap bukti, kredibilitas sumber, serta konsekuensi pengetahuan yang dihasilkan (Abu Bakar et al., 2024). Kerangka tersebut menjadikan proses verifikasi bukan sekadar prosedur teknis, melainkan kewajiban moral yang menentukan kualitas hubungan antara pengetahuan, tindakan, dan tanggung jawab sosial.

Fenomena hoaks, misinformasi, dan malinformasi dapat dibaca melalui ayat-ayat *tabayyun* sebagai bentuk gangguan terhadap integritas pengetahuan publik. Hoaks bekerja melalui konstruksi informasi palsu yang dirancang untuk menghasilkan persepsi tertentu, sedangkan misinformasi sering muncul akibat penyebaran informasi keliru tanpa niat menyesatkan (Guess & Lyons, 2020). Malinformasi memiliki karakter berbeda karena menggunakan informasi yang secara faktual benar untuk tujuan merugikan pihak tertentu melalui penghilangan konteks, manipulasi framing, atau eksploitasi aspek privat (El Mikati et al., 2023). Ketiga fenomena tersebut memperlihatkan pentingnya prinsip kehati-hatian epistemik yang ditekankan Al-Qur'an. Perspektif ini memungkinkan ayat-ayat *tabayyun* berfungsi sebagai instrumen analisis terhadap berbagai bentuk distorsi informasi yang berkembang melalui media digital. Fokusnya mencakup deteksi informasi yang mengalami reduksi konteks, penyusunan selektif, atau penyajian parsial sehingga menghasilkan pemahaman yang dapat dipertanggungjawabkan.

Propaganda digital dan berbagai praktik manipulasi informasi memperlihatkan dimensi lain yang dapat dibaca melalui prinsip-prinsip *tabayyun*. Propaganda sering memanfaatkan pengulangan narasi, seleksi informasi, dan penguatan sentimen untuk membentuk persepsi kolektif (Mattingly & Yao, 2022). Efektivitas propaganda terletak pada kemampuannya memengaruhi cara publik menafsirkan realitas, bukan semata-mata pada akurasi informasi yang disampaikan (Till, 2021). Ayat-ayat *tabayyun* menghadirkan pendekatan yang menuntut evaluasi kritis terhadap struktur argumentasi, tujuan komunikasi, serta posisi sumber informasi. Sudut pandang ini memperluas ruang verifikasi melampaui pemeriksaan fakta menuju analisis terhadap kepentingan yang bekerja di balik produksi dan distribusi informasi. Informasi yang akurat secara parsial tetap dapat menghasilkan kesimpulan keliru apabila disusun untuk mengarahkan opini menuju tujuan tertentu (Salovich & Rapp, 2021). Prinsip pembuktian dalam Al-Qur'an mengandung implikasi penting bahwa kebenaran berkaitan dengan proses pembentukan klaim dan mekanisme legitimasi yang menyertainya. Pembacaan tersebut relevan untuk memahami bagaimana narasi digital dapat membentuk persepsi politik, sosial, maupun keagamaan melalui strategi persuasif yang memanfaatkan emosi, identitas, dan afiliasi kelompok. *Tabayyun* berfungsi sebagai instrumen intelektual yang mendorong pembacaan reflektif terhadap konstruksi makna yang terkandung dalam suatu pesan sebelum pesan tersebut diterima sebagai representasi realitas.

Krisis otoritas pengetahuan yang mengemuka pada era platform digital semakin menegaskan relevansi ayat-ayat *tabayyun* sebagai fondasi etika epistemik. Ruang digital memungkinkan hampir setiap individu menjadi produsen informasi sekaligus distributor pengetahuan (Cruz-Cárdenas et al., 2025). Kondisi tersebut memperluas akses terhadap informasi, sekaligus mengaburkan batas antara otoritas ilmiah, opini personal, pengalaman subjektif, dan klaim spekulatif. Akibatnya, legitimasi pengetahuan sering ditentukan oleh tingkat visibilitas, popularitas, atau kemampuan menarik perhatian publik. Ayat-ayat *tabayyun* menawarkan kriteria alternatif yang berpusat pada validitas sumber dan kekuatan bukti. Pengetahuan memperoleh legitimasi bukan karena banyak diikuti atau sering diulang, melainkan karena didukung argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Perspektif ini memiliki implikasi penting terhadap cara masyarakat menilai otoritas informasi. Kredibilitas tidak dapat dipisahkan dari integritas sumber, kompetensi pengetahuan, dan konsistensi pembuktian. Kerangka tersebut membantu menjelaskan mengapa penyebaran informasi yang masif tidak otomatis menghasilkan pengetahuan yang sahih. Relevansi ayat-ayat *tabayyun* terletak pada kemampuannya membangun budaya epistemik yang menempatkan validasi rasional sebagai syarat utama penerimaan informasi.

Hubungan antara tanggung jawab moral penerima informasi dan kewajiban intelektual untuk melakukan verifikasi menjadi aspek sentral dalam pembacaan kontekstual ayat-ayat *tabayyun* terhadap disinformasi digital. Banyak kajian

mengenai informasi digital menempatkan masalah utama pada produsen informasi palsu (Bontridder & Poulet, 2021; Vaccari & Chadwick, 2020). Perspektif Al-Qur'an memperluas fokus tersebut dengan menempatkan penerima informasi sebagai aktor yang turut memikul tanggung jawab epistemik. Setiap individu memiliki kewajiban untuk memastikan kualitas informasi sebelum menjadikannya dasar penilaian, keputusan, atau tindakan sosial. Konsekuensinya, penyebaran informasi yang belum diverifikasi tidak dapat dipahami sebagai tindakan netral karena berpotensi menghasilkan dampak sosial yang luas. Prinsip ini menunjukkan keterkaitan erat antara etika komunikasi dan etika pengetahuan. Kesalahan epistemik dapat berkembang menjadi kerugian sosial ketika informasi yang tidak teruji memengaruhi reputasi individu, hubungan antarkelompok, stabilitas sosial, atau kebijakan publik. Ayat-ayat *tabayyun* mengajarkan bahwa tanggung jawab moral tidak berhenti pada niat baik, melainkan mencakup ketelitian intelektual dalam memeriksa kebenaran informasi.

Proses pembentukan opini publik juga dapat dibaca melalui kerangka *tabayyun* sebagai arena yang mempertemukan dimensi moral, rasional, dan sosial dari aktivitas komunikasi. Opini publik terbentuk melalui akumulasi informasi yang diterima, dipercaya, dan direproduksi oleh masyarakat. Kualitas opini publik sangat bergantung pada kualitas pengetahuan yang menjadi fondasinya. Ketika informasi yang beredar didominasi klaim yang tidak terverifikasi, opini publik cenderung berkembang berdasarkan persepsi semu dan asumsi yang rapuh (Chen, Yin, Yang, Cong, & Li, 2021). Prinsip bukti, penggunaan akal, validitas sumber, serta kehati-hatian epistemik yang terkandung dalam ayat-ayat *tabayyun* menawarkan dasar normatif untuk membangun opini publik yang lebih rasional dan bertanggung jawab. Relevansinya terletak pada pembentukan kultur pengetahuan yang menghargai verifikasi, argumentasi, dan integritas informasi.

Kultur semacam ini menjadi prasyarat penting bagi terciptanya ruang publik yang sehat, karena keputusan sosial yang berkualitas mensyaratkan pengetahuan yang berkualitas pula. Ayat-ayat *tabayyun* memperlihatkan bahwa tantangan disinformasi digital pada hakikatnya merupakan persoalan epistemologis dan etis yang berkaitan dengan cara manusia memperoleh, menilai, serta menggunakan informasi. Signifikansi pesan Al-Qur'an tetap aktual karena transformasi teknologi komunikasi tidak mengubah kebutuhan fundamental manusia terhadap kebenaran, pembuktian rasional, dan tanggung jawab moral dalam membangun pengetahuan kolektif.

Penutup

Perkembangan ekosistem informasi digital memperlihatkan bahwa persoalan disinformasi pada hakikatnya berkaitan erat dengan krisis epistemologis mengenai cara pengetahuan diproduksi, divalidasi, dan diterima oleh masyarakat. Melalui pembacaan tematik terhadap ayat-ayat *tabayyun*, terungkap bahwa Al-Qur'an membangun suatu kerangka epistemologis yang menempatkan verifikasi informasi

sebagai prasyarat pembentukan kebenaran sekaligus mekanisme pengendalian arus pengetahuan publik. Prinsip tersebut terhubung secara sistematis dengan pemetaan Al-Qur'an mengenai sumber, motif, dan bentuk informasi menyesatkan melalui konsep *ifk*, *kazib*, *buhtān*, serta *qawl al-Zūr* yang menunjukkan bahwa penyimpangan informasi bukan sekadar kesalahan komunikasi, melainkan konstruksi sosial yang dapat merusak tatanan moral dan intelektual. Kritik Al-Qur'an terhadap prasangka, spekulasi, dan penerimaan informasi tanpa landasan pengetahuan memperlihatkan relevansi kuat terhadap logika algoritma digital yang lebih mengutamakan viralitas, popularitas, serta keterlibatan pengguna daripada validitas informasi. Temuan ini memperkaya pengembangan tafsir tematik kontemporer, epistemologi Al-Qur'an, serta studi agama era digital, sekaligus menawarkan landasan normatif bagi penguatan literasi informasi dan kesadaran kritis masyarakat. Keterbatasan utama terletak pada orientasi kepustakaan dan analisis tafsir sehingga belum menguji perilaku pengguna media maupun efektivitas penerapan *tabayyun* pada praktik komunikasi digital. Agenda akademik mendatang perlu mengembangkan pendekatan interdisipliner yang menghubungkan tafsir Al-Qur'an dengan ilmu komunikasi digital, media studies, algoritma platform, dan perilaku informasi masyarakat guna memperluas validitas empiris serta kontribusi konseptual temuan yang diperoleh.

Daftar Pustaka

- Abu Bakar, A. Y., Fazial, F., Abdullah, S. R., Mohd Taher, N. H., Kasim, N. H., & Abdul Hamid, M. S. (2024). The Concept of Tabayyun in Dissemination of Information Through Mass Media. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 14(1), 2630–2642. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v14-i1/20693>
- Al-Fayrūzābādī, A. Ṭāhir M. ibn Y. (2005). *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah.
- Al-Ghazālī, M. (1994). *Qaḍāyā al-Mar'ah Bayn al-Taqlīd al-Rākidah wa al-Wāfidah*. Mesir: Dār al-Syurūq.
- Al-Ifrīqī, M. ibn M. ibn 'Alī A. al-F. J. I. M. al-A. (1999). *Lisān al-'Arāb*. Beirut: Dār al-Ṣadr.
- Al-Nawawī, A. Z. M. al-D. Y. ibn S. (1976). *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī.
- Al-Qurṭubī, A. 'Abdillāh M. ibn A. al-A. (1964). *al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān* (A. Al-Birdūnī & I. Aṭṭīsy, ed.). Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.
- Al-Ṭabarī, A. J. M. ibn J. (2001). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl ai Al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Ḥijr.
- Al-Zuḥaylī, W. (2009). *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Apuke, O. D., Omar, B., Tunca, E. A., & Gever, C. V. (2024). Information overload and

- misinformation sharing behaviour of social media users: Testing the moderating role of cognitive ability. *Journal of Information Science*, 50(6), 1371–1381. <https://doi.org/10.1177/01655515221121942>
- Aulia, Q. N., Al Ayubi, S., & Rosyadi, S. (2025). Critical Thinking Dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Tematik dan Implementasinya di Era Digital. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(1), 131–149. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v4i1.473>
- Berg, K. van den, Bedner, B., Zheng, M., Grote, P., & Shema, A. (2026). The Contestation of Interpretational Authority between 'Ulamā' and Artificial Intelligence: A Critical Study of AI Epistemology in Quranic Studies. *Al-Qarawiyyin: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 2(1), 20–38. <https://doi.org/10.64691/dh6rwb84>
- Bontridder, N., & Pouillet, Y. (2021). The role of artificial intelligence in disinformation. *Data & Policy*, 3, e32. <https://doi.org/10.1017/dap.2021.20>
- Chen, T., Yin, X., Yang, J., Cong, G., & Li, G. (2021). Modeling Multi-Dimensional Public Opinion Process Based on Complex Network Dynamics Model in the Context of Derived Topics. *Axioms*, 10(4), 270. <https://doi.org/10.3390/axioms10040270>
- Cruz-Cárdenas, J., Ramos-Galarza, C., Giménez-Baldazo, M., & Palacio-Fierro, A. (2025). A review of consumer-to-consumer digital information and knowledge sharing. *Management Decision*, 63(13), 96–122. <https://doi.org/10.1108/MD-04-2024-0869>
- El Mikati, I. K., Hoteit, R., Harb, T., El Zein, O., Piggott, T., Melki, J., ... Akl, E. A. (2023). Defining Misinformation and Related Terms in Health-Related Literature: Scoping Review. *Journal of Medical Internet Research*, 25, e45731. <https://doi.org/10.2196/45731>
- Firmansyah, Kurnia, S. S., Wiksana, W. A., Fadhli, A., Azzahra, S., & Cahyaning, R. (2025). Communication with Tabayyun on Negative Issues of Presidential Candidates on Social Media. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 18(1), 172–186. <https://doi.org/10.29313/mediator.v18i1.5297>
- Forum, W. E. (2024). *The Global Risks Report 2024*. Diambil dari <https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2024/>
- Freelon, D., & Wells, C. (2020). Disinformation as Political Communication. *Political Communication*, 37(2), 145–156. <https://doi.org/10.1080/10584609.2020.1723755>
- Guess, A. M., & Lyons, B. A. (2020). Misinformation, Disinformation, and Online Propaganda. In *Social Media and Democracy* (hal. 10–33). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108890960.003>
- Guess, A. M., Malhotra, N., Pan, J., Barberá, P., Allcott, H., Brown, T., ... Tucker, J. A. (2023). How do social media feed algorithms affect attitudes and behavior in an election campaign? *Science*, 381(6656), 398–404. <https://doi.org/10.1126/science.abp9364>
- Hastuti, H., Maulana, H. F., Lawelai, H., & Suherman, A. (2025). Algorithmic influence

- and media legitimacy: a systematic review of social media's impact on news production. *Frontiers in Communication*, 10, 1667471. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1667471>
- ‘Āsyūr, M. al-Ṭāhir I. (1985). *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Tunisia: al-Dār al-Tūnisiyyah.
- Ibn Farīs, A. Ḥusayn A. (1979). *Muʿjam Maqāyis al-Lughah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Is, F., Harahap, A. P., & Eddien Sharief, M. M. (2025). The Concept of Family Resilience Towards the Issue of Infidelity in Households: Analysis of the Hadith al-Ifki. *TAJID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 24(1), 80–107. <https://doi.org/10.30631/tjd.v24i1.568>
- Kaṣīr, A. al-F. I. ibn ‘Umar ibn. (2004). *Tafsīr Al-Qur'an al-‘Aẓīm* (A. Ghoffar & A. I. Al-Atsari, ed.). Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Lu, Y., Schaefer, J., Park, K., Joo, J., & Pan, J. (2024). How Information Flows from the World to China. *The International Journal of Press/Politics*, 29(2), 305–327. <https://doi.org/10.1177/19401612221117470>
- Maalsen, S. (2023). Algorithmic epistemologies and methodologies: Algorithmic harm, algorithmic care and situated algorithmic knowledges. *Progress in Human Geography*, 47(2), 197–214. <https://doi.org/10.1177/03091325221149439>
- Mahasneh, A. A. (2023). (Re)constructing Narratives in Qur'an Translation. *International Journal of Arabic-English Studies*, 23(2), 101–124. <https://doi.org/10.33806/ijaes.v23i2.455>
- Mäkelä, M., Björninen, S., Karttunen, L., Nurminen, M., Raipola, J., & Rantanen, T. (2021). Dangers of Narrative: A Critical Approach to Narratives of Personal Experience in Contemporary Story Economy. *Narrative*, 29(2), 139–159. <https://doi.org/10.1353/nar.2021.0009>
- Masri, D., & Warsodirejo, P. P. (2023). The Implementation of the Tabayyun Concept in Learning Islam to Enhance Attitudes of Religious Moderation. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(1), 853–862. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i1.2592>
- Mattingly, D. C., & Yao, E. (2022). How Soft Propaganda Persuades. *Comparative Political Studies*, 55(9), 1569–1594. <https://doi.org/10.1177/00104140211047403>
- Mernissi, F. (1993). *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*. Oxford: Basil Blackwell.
- Murtiningsih, & Adeoye, M. A. (2025). Hoaxes in Islamic Perspective: Qur'anic Solutions for Building an Anti-Hoax Society. *Al-Karim: International Journal of Quranic and Islamic Studies*, 3(1), 35–58. <https://doi.org/10.33367/al-karim.v3i1.6818>
- Piduru, B. R. (2022). Evaluating Personalization Algorithms in Social Media: Balancing User Engagement and Privacy. *Journal of Artificial Intelligence & Cloud Computing*, 1(4), 1. [https://doi.org/10.47363/JAICC/2022\(1\)194](https://doi.org/10.47363/JAICC/2022(1)194)

- Purnama, R. F. (2021). The Concept of Tabayyūn in the Qur'ān: Efforts to Address the Spread of Information on Social Media. *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir*, 6(1), 40–58. <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v6i1.2372>
- Ranalli, C., & Malcom, F. (2025). What's so bad about echo chambers? *Inquiry*, 68(10), 3984–4026. <https://doi.org/10.1080/0020174X.2023.2174590>
- Rhodes, S. C. (2022). Filter Bubbles, Echo Chambers, and Fake News: How Social Media Conditions Individuals to Be Less Critical of Political Misinformation. *Political Communication*, 39(1), 1–22. <https://doi.org/10.1080/10584609.2021.1910887>
- Ridha, M. R., & Abduh, M. (2008). *Tafsīr al-Manār*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Rifqa, Z., Shidqon, A., & Tumewu, N. P. (2023). Resistance to Economic Oligarchy in the Al-Quran through the Lens of Tafsir Nuzuli. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 8(2), 176. <https://doi.org/10.22373/tafse.v8i2.20585>
- Ruan, T., Liu, Q., & Chang, Y. (2025). Digital media recommendation system design based on user behavior analysis and emotional feature extraction. *PLOS One*, 20(5), e0322768. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0322768>
- Safrizal, M., Baker, S., Peterson, J., Amaefule, Z., & Hamad, K. S. (2026). The Transformation of Quranic Studies in the Era of Artificial Intelligence: An Epistemological Shift from Classical Scientific Tradition to the Digital Ecosystem. *Al-Qarawiyyin: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 2(1), 39–58. <https://doi.org/10.64691/d45aj033>
- Salovich, N. A., & Rapp, D. N. (2021). Misinformed and unaware? Metacognition and the influence of inaccurate information. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 47(4), 608–624. <https://doi.org/10.1037/xlm0000977>
- Savhira D.L., R., Alaika, A. M. B. K. P., & Firdaus, D. (2020). Called Al-Qur'an Digital Perspective: Answer To Raising Hoax In Era Of Disruption. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 31(2), 237–252. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v31i2.1063>
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2010). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suswita, S. (2025). Antara Taklid dan Ijtihad: Dialektika Pembentukan Nalar Kritis Siswa dalam Pendidikan Islam. *Al-Qarawiyyin: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 1(3), 208–224. <https://doi.org/10.64691/al-qarawiyyin.v1i3.52>
- Talamanca, G. F., & Arfini, S. (2022). Through the Newsfeed Glass: Rethinking Filter Bubbles and Echo Chambers. *Philosophy & Technology*, 35(1), 20. <https://doi.org/10.1007/s13347-021-00494-z>
- Tellis, G. J., MacInnis, D. J., Tirunillai, S., & Zhang, Y. (2019). What Drives Virality (Sharing) of Online Digital Content? The Critical Role of Information, Emotion,

- and Brand Prominence. *Journal of Marketing*, 83(4), 1–20. <https://doi.org/10.1177/0022242919841034>
- Till, C. (2021). Propaganda through 'reflexive control' and the mediated construction of reality. *New Media & Society*, 23(6), 1362–1378. <https://doi.org/10.1177/1461444820902446>
- Vaccari, C., & Chadwick, A. (2020). Deepfakes and Disinformation: Exploring the Impact of Synthetic Political Video on Deception, Uncertainty, and Trust in News. *Social Media + Society*, 6(1), 2056305120903408. <https://doi.org/10.1177/2056305120903408>
- Zhang, Y., & Gosline, R. (2023). Human favoritism, not AI aversion: People's perceptions (and bias) toward generative AI, human experts, and human-GAI collaboration in persuasive content generation. *Judgment and Decision Making*, 18, e41. <https://doi.org/10.1017/jdm.2023.37>